

Analisis Yuridis Mengenai Kesesuaian Kontrak Kerja Antara Atlet Esport Dan Pengusaha Bidang  
Esport Di Jakarta Di Tinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003

Oleh

Andi Maaputra<sup>1</sup> dan Ari Hermawan<sup>2</sup>

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian dan mengetahui serta menganalisis kontrak kerja antara atlet *eSport* dan pengusaha *eSport* di Jakarta dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dan juga mengkaji status hukum atlet *eSport* ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Penelitian adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi (1) UUD 1945 (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2005 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, Bahan hukum sekunder dengan teknik dokumentasi: Buku-buku ilmiah; Dokumen-dokumen; Laporan-laporan dan bahan dari internet, dan disajikan secara deskriptif.

Dari analisa dan pembahasan hasil penelitian didapat jawaban sebagai berikut : Kesesuaian kontrak kerja antara atlet *eSport* dan pengusaha *eSport* sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana sudah memenuhi yang menjadi syarat sahnya perjanjian oleh Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Status hukum yang melibatkan atlet Esport dengan pengusaha merupakan pekerja PKWT karena adanya hubungan kerja, karena memenuhi unsur-unsur di dalam UU Ketenagakerjaan yaitu upah, pekerja dan perintah kerja. Perlu adanya standarisasi kontrak supaya tidak berat sebelah dan merugikan salah satu pihak.

Kata kunci : kontrak kerja, atlet esport, status hukum.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (maaputra@gmail.com)

<sup>2</sup> Guru Besar Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Juridical Analysis Regarding the Suitability of Work Contracts between Esport Athletes and Esport Employers in Jakarta in Review of Law No. 13 of 2003

By

Andi Maaputra<sup>1</sup> dan Ari Hermawan<sup>2</sup>

ABSTRACT

This study discusses assessing alignment and studying and analyzing employment contracts between eSport athletes and eSport employers in Jakarta with Law No. 13 of 2003 and also examines the legal status of eSport athletes in terms of Law No. 13 of 2003.

This type of research is a descriptive analytical normative research. The data collection technique used is literature study. The legal materials used include (1) 1945 Constitution (2) Law No. 13 of 2003 (3) Law No. 3 of 2005 (4) Government Regulation Number 16 of 2007, Secondary legal materials: Scientific books; Documents; Reports and material from the internet.

From the analysis and discussion of the results of the study obtained the following answers: The suitability of the employment contract between eSport athletes and eSport employers is in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning manpower that has fulfilled the requirements that must be met by Article 52 paragraph (1) and then legal status involving athletes Esport with employers is a work relationship, because it meets the elements in the Manpower Act namely wages, workers and work orders. It is necessary to standardize the contract so that it is not biased and is detrimental to one party.

Keywords: agreement, Esport, legal status

---

<sup>1</sup>Master's Degree Student of Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (maaputra@gmail.com)

<sup>2</sup> Professor of Labor Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.